

ABSTRAK

Penelitian ini mendeskripsikan pola dari pemerintahan bencana di Asia Tenggara melalui *Association of South East Asian Nations* (ASEAN), sebagai organisasi regional. Melalui *ASEAN Agreement on Disaster Management and Emergency Response* (AADMER) didukung pendekatan Komunitas Sosial Budaya dan Komunitas Politik Keamanan ASEAN. AADMER melibatkan aktor lintas sektoral (ASEAN, Mitra Wicara dan Organisasi Masyarakat Sipil) sebagai upaya spesifik di regional dalam mendukung kerjasama manajemen bencana. Asia Tenggara sebagai kawasan rawan bencana telah memiliki suatu kebijakan regional yang strategis dan terintegrasi sebagai usaha meminimalkan faktor resiko dari bencana. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-analitis sebagai alat analisisnya dengan menggunakan data sekunder. Fokus tulisan ini adalah menemukan bentuk pemerintahan bencana di Asia Tenggara melalui kolaborasi peran dari ASEAN, Mitra Wicara (melalui kerjasama *ASEAN Regional Forum* dan *ASEAN Defense Minister Meeting Plus*) dan Organisasi Masyarakat Sipil. ASEAN telah mengembangkan *disaster governance* dengan menggunakan AADMER sebagai landasan kebijakannya, dengan memaksimalkan peran organisasi masyarakat sipil dilengkapi dengan jaringan *disaster governance* yang luas dengan melibatkan kerjasama sipil dan militer melalui pemaksimalan organisasi ACDM, ARF dan ADMM Plus, yang mendemonstrasikan pendekatan *pluricentric* daripada *unicentric* serta proses memerintah tanpa pemerintah dalam kebijakan tentang manajemen

bencana. Pola tersebut membantu untuk menjelaskan bentuk, karakteristik dan makna dari *regional disaster governance* di Asia Tenggara yang mengacu pada perspektif neoliberalisme institusionalisme tentang insitusi dan melengkapi penjelasan tentang pengelolaan kerjasama internasional.

Kata Kunci: AADMER, ASEAN, pemerintahan bencana, pemerintahan bencana regional.